



**PIDATO
PIMPINAN RAPAT PARIPURNA DPRD PROVINSI SUMATERA BARAT
DALAM RANGKA PENYAMPAIAN JAWABAN GUBERNUR
TERHADAP PANDANGAN UMUM FRAKSI
TERHADAP 3 (TIGA) RANPERDA
SELASA, 11 JUNI 2024**

ASSALAMU'ALAIKUM WR. WB.

YTH. SDR. GUBERNUR SUMATERA BARAT.

**YTH. SDR. WAKIL KETUA DAN REKAN-REKAN ANGGOTA DPRD
PROVINSI SUMATERA BARAT.**

YTH. PIMPINAN PT. BANK NAGARI, PIMPINAN BUMD

**YTH. SDR. SEKRETARIS DAERAH, ASISTEN, STAF AHLI, PIMPINAN
OPD DILINGKUP PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT.**

YTH. PARA WARTAWAN DAN HADIRIN YANG BERBAHAGIA.

Puji syukur marilah kita persembahkan kehadirat Allah SWT, karena atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, kita masih diberikan kesehatan dan kekuatan untuk dapat hadir bersama-sama pada Rapat Paripurna DPRD Provinsi Sumatera Barat pada malam hari ini, dengan acara “ Penyampaian Jawaban Gubernur terhadap Pandangan

Umum Fraksi-Fraksi atas 3 (tiga) Ranperda yaitu Ranperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023, Ranperda RPJPD tahun 2025-2045, Ranperda tentang perusahaan perseroan daerah penjaminan kredit daerah ”.

Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada Bapak/Ibu dan hadirin sekalian yang telah berkenan memenuhi undangan kami untuk dapat menghadiri Rapat Paripurna Dewan pada hari ini.

Dengan mengucapkan ”Bismillahirrahmanirrahim” Rapat Paripurna DPRD Provinsi Sumatera Barat, Selasa tanggal 11 Juni 2024 dengan acara “ Penyampaian Jawaban Gubernur terhadap Pandangan Umum Fraksi-Fraksi atas 3 (tiga) Ranperda, kami buka dan dinyatakan terbuka untuk umum.

..... (Ketukan Palu 3 Kali).

Sdr. Gubernur dan Hadirin yang kami hormati;

Sesuai dengan tahapan pembahasan Ranperda, pada Rapat Paripurna DPRD tanggal 10 Juni 2024 kemaren, Fraksi-Fraksi DPRD Provinsi Sumatera Barat telah menyampaikan Pandangan Umum Fraksinya terhadap Ranperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun 2023, Ranperda tentang RPJPD Tahun 2025-2045, Ranperda tentang Perusahaan Perseroan Daerah Penjaminan Kredit Daerah.

Dalam Pandangan Umum Fraksi-Fraksi tersebut, cukup banyak pertanyaan, tanggapan dan pandangan yang diberikan terhadap 3 (tiga) Ranperda tersebut.

Terhadap Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun 2023, Fraksi-Fraksi menyoroti tentang kinerja pendapatan, belanja serta capaian kinerja RPJMD dari penggunaan belanja tersebut, diantaranya :

1. Sudah sampai sejauhmana capaian kinerja dari pelaksanaan 7 (tujuh) agenda prioritas pembangunan daerah sampai Tahun 2023, terutama agenda pembangunan bidang SDM, bidang sosial

kemasyarakatan, ekonomi dan pembangunan sektor pertanian.

2. Kinerja pengelolaan pendapatan daerah, terutama dari PAD yang menjadi indikator utama, masih belum optimal dan bahkan kinerjanya lebih rendah dari Tahun 2022. Hal ini menunjukkan terjadinya kondisi yang anomaly, dimana objek dan volume meningkat, tetapi penerimaan berkurang, baik pada pos PKB, BBNKB dan pendapatan BLUD RSUD.
3. Distribusi dan alokasi anggaran belum mendukung upaya percepatan pembangunan daerah. Alokasi belanja operasional jauh lebih besar dari alokasi belanja modal. Disamping itu, Pemerintah Daerah juga belum mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi untuk mengefisienkan penggunaan belanja barang dan jasa.
4. Belum ada keseriusan Pemerintah Daerah untuk melaksanakan program subsidi bunga pinjaman bagi UMKM dan sektor usaha mikro yang telah dialokasikan dalam APBD. Ini merupakan tahun ke dua tidak

terlaksananya program tersebut yang sangat dibutuhkan oleh sektor usaha mikro.

Terhadap Ranperda tentang RPJPD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025-2045 Fraksi-Fraksi menyampaikan pandangan, diantaranya :

1. Meskipun visi, misi, arah kebijakan dan sasaran pokok dari RPJPD ditentukan langsung oleh Pemerintah, akan tetapi tetap memperhatikan kondisi, permasalahan, karakteristik daerah dan kemampuan daerah untuk mewujudkannya.
2. Bagaimana mensinergikan penyusunan RPJPD dengan dokumen perencanaan jangka panjang daerah lainnya yang sudah ada, seperti sinergisitas dengan RTRW, RPPLH, LP2B, RIPDA dan dokumen lainnya, agar saling mendukung satu sama lainnya.
3. Dalam upaya mewujudkan pembangunan daerah yang berkelanjutan, bertahap dan konsisten, bagaimana kebijakannya mensinkronkan hasil pencapaian RPJPD Tahun 2025-2045 dengan dokumen RPJPD yang disusun

saat ini, jika ada target yang belum tuntas/belum tercapai bagaimana menindaklanjutinya ?

4. Bagaimana strategi jangka panjang dan upaya pemerintah daerah dalam memacu percepatan pembangunan daerah, pemberdayaan ekonomi Masyarakat dalam bingkai agama dan budaya yang akan ditungkan dalam RPJPD Tahun 2025-2045
5. Agar program-program pembangunan yang telah disusun diikuti dengan strategi dan langkah yang riil atau nyata sehingga bisa dievaluasi terhadap hasil yang telah dicapai, sehingga RPJPD ini tidak hanya bersifat teoritik dan normatif saja, tetapi sesuai dengan yang diinginkan oleh masyarakat Provinsi Sumatera Barat. Hal ini penting karena masyarakat tidak membutuhkan retorika-retorika yang akhirnya akan menjadi janji-janji belaka.

Sedangkan terhadap Ranperda tentang Perusahaan Perseroan Daerah Penjaminan Kredit Daerah, Fraksi-Fraksi juga menyampaikan pandangan sebagai berikut :

1. Perubahan Perda tentang Pendirian PT. Jamkrida adalah merupakan tuntutan dari beberapa aturan yang lebih tinggi, seperti Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang BUMD, dan aturan lainnya yang terkait dengan BUMD PT. Jamkrida tersebut. Namun demikian Fraksi-fraksi ingin mengetahui dengan adanya perubahan perda ini apa keuntungannya bagi PT. Jamkrida dan apa keuntungannya bagi Koperasi dan UMKM yang akan mendapatkan penjaminan kredit atau hanya sekedar untuk memenuhi tuntutan dari aturan yang lebih tinggi.
2. Apakah keberadaan perusahaan-perusahaan BUMD, termasuk Perusahaan penjamin kredit ini sudah memberikan dampak dan manfaat positif bagi masyarakat.
3. Langkah-langkah bisnis yang akan oleh Perusahaan Perseroan Daerah Penjaminan Kredit Daerah di lakukan o

ditengah persaingan bisnis penjamin dengan milik BUMN dan Swasta.

4. Guna memenuhi ketentuan Pasal 5 Ranperda Perusahaan Perseroan Daerah Penjaminan Kredit Daerah terkait modal seberapa besar modal yang diperlukan yang dibutuhkan. Karena kenaikan modal dasar yang diajukan kini akan menjadi beban kedepannya bagi Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat.

Sdr. Gubernur dan Rapat Paripurna Yang kami Hormati;

Sesuai dengan tahapan dan mekanisme pembahasan Ranperda, terhadap Pandangan Umum Fraksi-Fraksi tersebut, akan diberikan pula jawaban dan/atau tanggapannya oleh Gubernur.

Berkenaan dengan hal dimaksud, tentunya Sdr. Gubernur telah menyiapkan jawaban atas Pandangan Umum Fraksi terhadap 3 (tiga) Ranperda tersebut, yang akan disampaikannya pada Rapat Paripurna ini.

Untuk itu, kepada Sdr. Gubernur kami persilahkan.

.....

Penyampaian Jawaban/Tanggapan Gubernur Atas
Pandangan Umum Fraksi-Fraksi terhadap 3 Ranperda

.....

Terima kasih kami sampaikan kepada Sdr. Gubernur yang telah menyampaikan Jawaban dan/atau tanggapannya atas Pandangan Umum Fraksi-Fraksi terhadap 3 (tiga) Ranperda, yaitu Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun 2023, Ranperda tentang RPJPD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025-2045 dan Ranperda tentang Perseroan Penjaminan Kredit Daerah.

Dari jawaban dan/atau tanggapan yang disampaikan oleh Sdr. Gubernur tadi, secara umum telah dapat menjawab dan menjelaskan dari pertanyaan, pandangan dan pendapat yang disampaikan oleh Fraksi-Fraksi. Namun demikian, apabila masih diperlukan penjelasan yang lebih dalam terhadap 3 (tiga) Ranperda tersebut, akan kita dalam

nanti dalam proses pembahasan terhadap 3 (tiga) Ranperda tersebut.

Rapat Paripurna Yang kami Hormati;

Dengan telah disampaikannya jawaban dan/atau tanggapan Gubernur terhadap Pandangan Umum Fraksi-Fraksi, maka proses pembahasan Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun 2023, Ranperda tentang RPJPD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025-2025 dan Ranperda tentang Perusahaan Perseroan Daerah Penjaminan Kredit Daerah, masuk pada tahap pembahasan oleh Komisi/Pansus dan Badan Anggaran.

Terkait dengan pembahasan Ranperda Pertanggungjawaban APBD Tahun 2023 nanti, kami perlu memberikan penekanan kepada Komisi-Komisi dan Badan Anggaran untuk dapat melihat Pertanggungjawaban APBD secara komprehensif.

Pertanggungjawaban APBD merupakan sarana untuk mengevaluasi APBD secara keseluruhan, mulai dari perencanaan program dan kegiatan, distribusi alokasi

anggaran, pelaksanaan dan pertanggungjawabannya. Oleh sebab itu, dalam pembahasan nanti tidak hanya focus pada aspek realisasi pendapatan, belanja dan SILPA, akan tetapi juga harus di dalam capaian target kinerja program dan kegiatan dari anggaran yang telah digunakan serta efektifitas dan efisien penggunaan anggaran.

Demikian juga dengan pembahasan Ranperda RPJPD dan Ranperda Perusahaan Perseroan Daerah Penjaminan Kredit Daerah, Komisi dan Pansus perlu melihat secara lebih tajam, baik terhadap misi, kebijakan, sasaran pokok dan target kinerja yang diusulkan dalam RPJPD serta objek dan dampak yang ditimbulkan dibentuknya Perda tentang Perusahaan Perseroan Daerah Penjaminan Kredit Daerah ini.

Rapat Paripurna Yang kami Hormati;

Dengan telah disampaikan jawaban dan/atau tanggapan Gubernur atas Pandangan Umum Fraksi-Fraksi terhadap Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023, Ranperda RPJPD tahun 2025-2045, dan Ranperda Perusahaan Perseroan daerah

penjaminan kredit daerah maka berakhir pulalah Rapat Paripurna kita pada hari ini.

Sebelum Rapat Paripurna ini kami tutup, terlebih dahulu kami menyampaikan permohonan maaf, apabila dalam pelaksanaan rapat paripurna terdapat hal-hal yang tidak pada tempatnya.

Akhirnya, dengan mengucapkan “Alhamdulillahilalamin” Rapat Paripurna pada hari ini dalam rangka Penyampaian Jawaban dan/atau Tanggapan Gubernur atas Pandangan Umum Fraksi-Fraksi terhadap Ranperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun 2022, Ranperda RPJPD tahun 2025-2045, Ranperda Perusahaan Perseroan daerah penjaminan kredit daerah secara resmi kami tutup.

..... (ketukan palu 3x)

Terima kasih.

Billahitaufiq walhidayah

Wss.Wr.Wb

